



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008 KEPADA MASYARAKAT

Bismillahirrohmanirrohim

Assalaamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu

Masyarakat Kabupaten Wonogiri yang Kami hormati, Kami cintai dan Kami banggakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Wonogiri yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2008 dapat kita rasakan semakin membaik dibanding tahun sebelumnya.

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk

menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian laporan ini disusun dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya ijin kami menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 7⁰32' dan 8⁰15' Lintang Selatan (LS) dan antara 110⁰41' dan 111⁰18' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur dan Samudra Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi terbagi atas 25 Kecamatan yang terdiri dari 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2007 jumlah penduduk Wonogiri sebanyak 1.181.114 jiwa sedangkan sampai akhir bulan Desember tahun 2008 sebanyak 1.212.677 jiwa, atau mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 0,03%. Sedangkan proporsi jumlah penduduk terbanyak berdasarkan pada kelompok umur adalah umur 26-60 tahun yaitu sebesar 51,28%, berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat Sekolah Dasar/Sederajat yaitu sebesar 38,02% dan berdasarkan mata pencaharian terbanyak adalah bekerja pada bidang lain diantaranya meliputi jasa-jasa (tukang cukur, tukang batu, tukang jahit, penata rambut, tukang kayu dan lain-lain); buruh harian (buruh harian lepas, buruh tani, buruh

perkebunan, buruh nelayan, buruh peternakan dan lain-lain); pembantu rumah tangga; seniman, tabib dan lain-lain yaitu sebesar 35,51% dan disusul pada bidang pertanian sebanyak 30,98%. Dari kondisi di atas, akan berakibat pada semakin beratnya tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kondisi topografi yang sebagian besar tanahnya berbukit berupa pegunungan kapur, tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30⁰, ketinggian tanah cukup bervariasi antar wilayah kecamatan yaitu mulai dari 106 meter sampai dengan lebih dari 600 meter dpl (di atas permukaan laut) dengan jenis tanah yang sangat beragam yaitu litosol, regosol dan grumusol beserta asosiasi perubahannya serta berasal dari bahan induk yang beraneka ragam diantaranya batuan endapan maupun vulkan, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sumberdaya alam yang ada sekaligus pula berpengaruh terhadap potensi sumberdaya buatan yang menjadi potensi unggulan daerah. Potensi unggulan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis Komoditi	Potensi/Produksi	Lokasi
a. Potensi Komoditi Bahan Tambang			
1.	Emas	745,126 Kg	Kec. Jatiroto, Selogiri
2.	Tembaga	21.561 ton	Kec. Tirtomoyo, Baturetno, Jatisrono
3.	Galena	14.632 ton	Kecamatan Karangtengah
4.	Batu Gamping	3.599 juta m3	Kec. Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno.
5.	Andesit	205. 865.625 m3	Kec. Ngadirojo, Jatiroto, Manyaran, Giriwoyo, Selogiri
6.	Trass	Perlu penelitian lebih lanjut	Kec. Slogohimo, Kec. Puhpelem
7.	Pasir Kuarsa	Perlu penelitian lebih lanjut	Kec. Batuwarno
8.	Bentonit	Volume sulit ditentukan, luas sebaran 200 Ha.	Kec. Giriwoyo
9.	Lempung	Volume sulit ditentukan, perlu penelitian lebih lanjut	Kec. Tirtomoyo, Kec. Ngadirojo
b. Potensi Komoditi Tanaman Pangan			
1	Padi	219.389 ton	24 Kecamatan
2	Jagung	285.919 ton	25 Kecamatan
3	kedele	22.285 ton	10 Kecamatan
4	Kacang Tanah	47.017 ton	10 Kecamatan
5	Ketela Pohon	1.078.738 ton	25 Kecamatan
c. Potensi Komoditi Perkebunan			
1	Kelapa dalam	11.033,06 ton	25 kecamatan
2	Kelapa deres	363,08 ton	Kec. Pracimantoro dan Kec. Paranggupito
3	Cengkeh	2.433 ton	21 Kecamatan
4	Mete	15.262,84 ton	25 Kecamatan
5	Kapuk	69,63 ton	20 Kecamatan
6	Kopi Arabika	37,11 ton	9 Kecamatan
7	Kopi Robusta	31,62 ton	11 Kecamatan
8	Tebu	1.559 ton	13 Kecamatan
9	Kapas	35,71 ton	6 Kecamatan
10	Tanaman obat	8.722,5 ton	25 Kecamatan
11	Kapulogo	3,8 ton	25 Kecamatan
12	Kakao	240,13 ton	11 Kecamatan
d. Potensi Komoditi Hortikultura			
1	Mangga	42.078 ton	25 Kecamatan
2	Durian	3.493 ton	23 Kecamatan
3	Rambutan	9.287 ton	25 Kecamatan

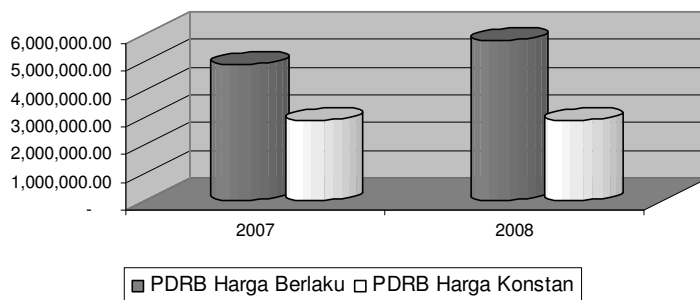
No.	Jenis Komoditi	Potensi/Produksi	Lokasi
4	Pisang	25.780 ton	25 Kecamatan
5	Minjo	8.585 ton	25 Kecamatan
e. Potensi Komoditi Perikanan			
1	Benih ikan	4.629.000 ekor	8 Kecamatan (Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Manyaran, Jatipurno, Slogohimo, Selogiri dan Wonogiri)
2	Ikan Konsumsi	2.021,96 ton	Waduk Gajah Mungkur, Cekdam, Telaga, Sungai, Waduk-waduk Kecil, Perkolaman dan Genangan lainnya.
f. Potensi Komoditi Peternakan			
1	Sapi Potong	151.377 ekor	25 Kecamatan
2	Kerbau	1.488 ekor	10 Kecamatan
3	Kambing	479.569 ekor	25 Kecamatan
4	Babi	5.259 ekor	9 Kecamatan
5	Domba	114.612 ekor	25 Kecamatan
6	Kelinci	7.451 ekor	12 Kecamatan
7	Ayam sayur	2.140.075 ekor	25 Kecamatan
8	Ayam ras (potong)	194.156 ekor	16 Kecamatan
9	Ayam ras (petelur)	10.714 ekor	16 Kecamatan
10	Itik	40.895 ekor	22 Kecamatan
11	Burung puyuh	9.687 ekor	15 Kecamatan
12	Entog	13.239 ekor	21 Kecamatan
13	Angsa	12.897 ekor	22 Kecamatan
14	Daging Sapi	6.795,69 Ton	25 Kecamatan
15	Daging Kerbau	7.092 ton	10 Kecamatan
16	Daging Kambing	925,06 ton	25 Kecamatan
17	Daging Domba	297,99 ton	25 Kecamatan
18	Daging Babi	6.273 ton	9 Kecamatan
19	Daging Ayam sayur	1.710,56 ton	25 Kecamatan
20	Daging Ayam Ras	558,53 ton	16 Kecamatan
g. Potensi Komoditi Industri Pengolahan			
1	Mebel kayu/furniture	6 perusahaan nilai ekspor : Rp. 10.025.349.033,50	Kec. Wonogiri
2	Minyak Atsiri	320.856 lt/tahun	Kec. Wonogiri
3	Kacang mete	579,2 ton	Kec. Jatisrono
4	Tepung tapioka	4.500 ton/tahun	Kec. Wonogiri
5	Tatah sungging	7.400 Pcs	Kec. Manyaran
6	Batu mulia/fosil	6.000 Pcs	Kec. Giriwoyo
7	Gula kelapa	2.191,77 kristal/tahun	Kec. Paranggupito
8	Batik tulis	9.500 lembar	Kec. Tirtomoyo
h. Potensi Obyek Wisata			
No.	Jenis Obyek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1.	Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur	Kec. Wonogiri	Waduk serbaguna dengan berbagai fasilitas wisata air seperti perahu motor, jet ski dan jet boat.
2.	Kahyangan	Kec. Tirtomoyo	Tempat pertapaan Panembahan Senopati.
3.	Gua Putri Kencana	Kec. Pracimantoro	Keindahan stalagtit dan stalagmit, serta terdapat tujuh kamar/ruangan untuk tirakat dan sarasehan .
4.	Pantai Nampu dan Pantai Sembukan	Kec. Paranggupito	Panorama alam yang indah dan hamparan pasir putih & Dinding pantai yang terjal dengan kenampakan teras-teras marin dan dihiasi hamparan bukit-bukit karst
5.	Setren	Kec. Slogohimo	Panorama alam yang indah, udara sejuk, air terjun,
6.	Perbukitan Karst	Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Paranggupito	Hamparan perbukitan karst dengan karaktereistik alam, sosial budaya masyarakatnya yang khas

Sumber data : Dinas LHKP, Dipertan, Dinas Wanperla, Diperindakop dan Pendal, DPPSB, Tahun 2008.

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan ekonomi sebagai berikut :

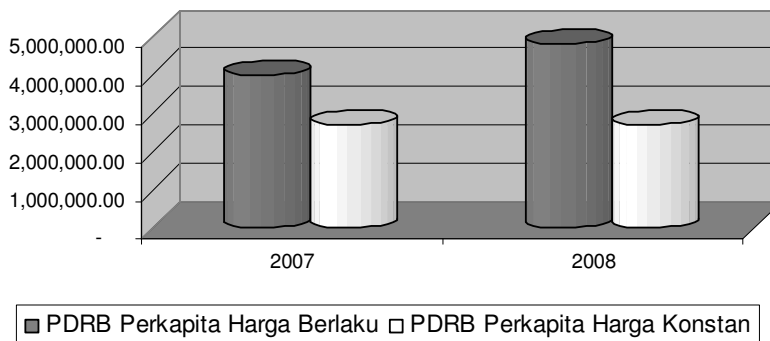
1. Berdasarkan perhitungan BPS bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.2.657.068,93 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2008 diprediksi sebesar Rp.2.791.273,37 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp.4.551.726,36 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 12,65%. Sedangkan pada tahun 2008 diprediksi sebesar Rp.5.260.454,10 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,57 %.

GRAFIK PDRB



2. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Wonogiri atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp.4.389.828,24 atau naik sebesar 0,10% dari tahun 2007 sebesar Rp.3.952.245,77. Sedangkan pendapatan perkapita penduduk atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 sebesar Rp.2.329.306,64 atau naik sebesar 0,01% dari tahun 2007 sebesar Rp.2.307.122,31.

GRAFIK PDRB PERKAPITA



B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonogiri ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2006-2010 yaitu “**WONOGIRI SUKSES, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, DEMOKRATIS, AGAMIS, DAN BERDAYASAING** “. Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Visi *Sejahtera*, ditempuh melalui Misi :
 - a. Menanggulangi kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan dan air bersih) secara layak, peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan keluarga kecil yang berkualitas.
 - b. Menangani pengangguran, melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan berkualitas.
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.
 - e. Menumbuhkan perekonomian berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Untuk mewujudkan Visi *Demokratis*, ditempuh melalui Misi :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara dinamis dalam kerangka supremasi hukum.
3. Untuk mewujudkan Visi *Agamis*, ditempuh melalui Misi :
 - a. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia masyarakat serta kerukunan dan kualitas peribadatan semua umat beragama.
 - b. Mengembangkan kebudayaan daerah yang berlandaskan nilai luhur dan norma agama.
4. Untuk mewujudkan Visi *Berdayasaing*, ditempuh melalui Misi :
 - a. Merevitalisasi pertanian guna mendukung pengembangan industri berbasis pertanian.
 - b. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan.

- d. Mengembangkan potensi pariwisata berbasis alam dan budaya daerah.
- e. Meningkatkan penggalan pendapatan daerah secara adil dan mendukung perekonomian daerah.
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah guna mewujudkan tata pemerintahan (*good governance*) yang baik.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada maka strategi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam rangka memperlancar dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun yaitu : Strategi Menumbuhkan Ekonomi Daerah; Strategi Menyeimbangkan Pembangunan Antar Wilayah; Strategi Memelihara Stabilitas Daerah dan Strategi Memantapkan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan misi dengan menggunakan strategi di atas maka ditetapkan kebijakan umum daerah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memegang teguh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Memberdayakan segenap potensi masyarakat dan sektor swasta dalam proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar, serta koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
4. Mengarahkan segenap program pembangunan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Prioritas Daerah

Sebagai tahapan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dijabarkan secara bertahap setiap tahun dalam wujud dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan. Adapun prioritas pembangunan pada tahun 2008 meliputi : Penanggulangan Kemiskinan; Penanggulangan Pengangguran dan Penciptaan Lapangan Kerja; Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah; Peningkatan Pendapatan Daerah; Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Guna pelaksanaan rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri tahun 2008 sebagai sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum gambaran APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
I	Pendapatan Daerah	823.387.774.185	841.530.284.496	18.142.510.311	
1	Pendapatan Asli Daerah	43.476.570.500	54.129.294.926	10.652.724.426	124.50
2	Dana Perimbangan	696.848.199.918	705.841.541.545	8.993.341.627	101.29
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	83.063.003.767	81.431.573.051	(1.631.430.716)	98.04
II	Belanja Daerah	932.351.525.276	846.335.649.878	(86.015.875.398)	
1	Belanja Tidak Langsung	625.444.054.551	570.070.001.007	55.374.053.544	91.15
2	Belanja Langsung	306.907.470.725	276.265.648.871	30.641.821.854	90.02
	Surplus/defisit	(108.963.751.091)	(4.805.365.382)	(86.943.889.599)	
III	Pembiayaan Daerah				
1	Penerimaan Daerah	177.853.338.684	179.251.681.285	1.398.342.601	
2	Pengeluaran Daerah	11.664.956.085	11.654.937.655	(10.018.430)	
	Pembiayaan Netto	166.188.382.599	167.596.743.630	1.408.361.031	100.85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	57.224.631.508	162.663.503.273	105.483.871.765	284.25

Sumber data : DPPKAD Kabupaten Wonogiri, Tahun 2009.

C. URUSAN DESENTRALISASI

a. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama bahwa sasaran dan target kinerja pembangunan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2008. Sedangkan implementasi operasionalnya tertuang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2008. Berikut ini kami sampaikan secara garis besar capaian kinerja pada urusan wajib sebagai berikut :

Tabel. 3
Capaian Kinerja Pada Urusan Wajib

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	33,47 %
		% penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara)	96,95 %
		Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A	97,05 %
		Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs/Paket B	71,05 %
		Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMA/SMK/MA/Paket C	54,02 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,025 %

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,20 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30 %
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,75 %
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	93,97 %
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,12 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,37 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	64,46 %
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53,29 %
		Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	50 %
2	Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,25 %
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	69,39 %
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	30,90 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	68,62 %
		Cakupan kunjungan bayi	88,15 %
3	Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah	100 %
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	54,17 %
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,40 per 1000 penduduk
		Penegakan hukum lingkungan	0% (tidak ada kasus)
4	Pekerjaan Umum	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	60,50 %
		% Luas Irigasi kabupaten Baik	60,50 %
		% Rumah Tangga Per Sanitasi	64,50 %
		% Kawasan Kumuh	0,43 %
5	Tata Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	60 %
6	Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
		% Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%
7	Perumahan	% rumah tangga yang menggunakan air bersih	90 %
		% Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh	9,33 %
		Rasio rumah layak huni	57,49 %
8	Kepemudaan dan Olah Raga :	Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,0025/1000 penduduk
		Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk	0,253/1000 penduduk
9	Penanaman Modal	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	50,15 %
10	Koperasi dan UKM	% Jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi	92,80 %
		% Usaha Mikro dan Kecil	52,20 %

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	% kepemilikan KTP	60,57 %
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	344
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
12	Ketenaga kerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	85,84%
		Prosentase pekerja yang ditempatkan	23,15 %
13	Ketahanan Pangan	Regulasi ketahanan Pangan	Ada, Peraturan Bupati
		Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	155.170,51 kg/jiwa
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,10 %
		% Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	95 %
		% partisipasi angkatan kerja perempuan	41,34 %
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	82,85 %
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	44,03 %
16	Perhubungan	Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	1,25 %
17	Komunikasi dan Informatika	Web site milik pemerintah daerah	Ada
		Jumlah pameran/expo	6 kali promosi investasi
18	Pertanahan	% Luas lahan bersertifikat	61,42 %
		% Penyelesaian Kasus Tanah Negara	95 %
		% Penyelesaian Ijin Lokasi	100 %
19	Kesbang dan Politik	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	0 kegiatan
		Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 kegiatan
20	Otonomi Daerah	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	20 SIM
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tidak ada
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	% Jumlah PKK aktif	23,82 %
		% Posyandu	97,04 %
22	Sosial	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	12 buah
		% penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,19 %
		% PMKS yg memperoleh bantuan sosial	2,05 %
23	Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	15 event
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6 buah
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	83,30 %
24	Statistik	Penyusunan buku "provinsi /kabupaten/kota dalam angka"	Ada
		Penyusunan buku "PDRB provinsi/kabupaten/kota"	Ada
25	Kearsipan	Prosentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku	69,81 %
		Jumlah Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan	4 kegiatan
26	Perpustakaan	Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	49,23 %
		Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	9,62 %

b. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Secara garis besar capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan pilihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Capaian Kinerja Urusan Pilihan

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	100,005 %
		Jumlah konsumsi ikan	100,50 %
2	Pertanian	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,72 ton/ha
		% Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	50,04 %
3	Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,16 %
		Kerusakan Kawasan Hutan	0,22 %
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	% Pertambangan tanpa ijin/ Liar	65 %
		% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,83 %
5	Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	236.339 wisatawan
		% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,18 %
6	Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,72 %
		Pertumbuhan industri	0,397 %
7	Perdagangan	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,99 %
		Ekspor Bersih Perdagangan	48.984.372.562,-
8	Transmigrasi	% transmigran swakarsa	80 %

c. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan meliputi 13 (tiga belas) aspek dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 50 (lima puluh) penilaian yaitu :

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah:

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Rasio rumah yang memiliki IMB sebesar 1,35% dari jumlah rumah seluruhnya.
3. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 11 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Wonogiri.

4. Lamanya pengurusan KTP bagi masyarakat seseuai dengan Motto Pelayanan adalah 2 (dua) hari.
 5. Besarnya biaya pengurusan KTP bagi masyarakat sesuai dengan tarif sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, KK dan Akte Catatan Sipil yaitu sebesar Rp.7.000,-.
 6. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk sebanyak 0,0046 % atau 46 orang per 1.000 penduduk.
 7. Banyaknya demo / protes dalam setahun sebanyak 0 Kali.
 8. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 9. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 1986 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota (K-3) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
- b. Keselarasan dan efektifitas hubungan pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah:
1. Ketepatan waktu Penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 seharusnya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, namun penyampaiannya belum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 2. Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 seharusnya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, namun pengirimannya belum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 3. Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah sebanyak 4 urusan
 4. Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan dengan Pemerintah sebanyak 12 (dua belas) kali.
 5. Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten

- dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Jumlah Kerjasama dengan daerah lain sebanyak 4 kerjasama meliputi PAWONSARI, SUBOSUKAWONOSRATEN, BKKSI, KARISMAPAWIROGO.
- c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah, dengan capaian kinerja :
1. Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sebanyak 87,50 %.
 2. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah sebanyak 100 % atau sejumlah 26 (dua puluh enam) urusan.
 3. Penetapan Perda APBD dilaksanakan tidak tepat waktu, karena seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan baru ditetapkan pada bulan Maret 2009.
 4. Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 belum ada, masih dalam proses.
 5. Prosentase belanja untuk pelayanan dasar sebesar 19,81%. Pelayanan dasar yang dilaksanakan SKPD Kabupaten Wonogiri meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Koperasi dan UKM serta Pertanian.
 6. Prosentase belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar 10,92 % (tidak termasuk belanja pegawai).
 7. Belum adanya Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Belum adanya Perda/Keputusan Bupati Wonogiri yang mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian.
 9. Adanya Sistem Informasi Kepegawaian (SIK).
 10. Keberadaan SKPD Kabupaten Wonogiri belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Efektifitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD:
1. Jumlah Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2008 sebanyak 14 (empat belas) Perda.

2. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 sebanyak 82,35% atau sebanyak 14 Raperda dari 17 Raperda yang diusulkan.
- e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan:
 1. Voting dalam Sidang Paripurna yang diadakan DPRD Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2008 sebanyak 2,6 % atau 1 (satu) kali dari 38 kali Sidang Paripurna.
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 sebanyak 56 %.
 - f. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan:
 1. Prosentase Keputusan Bupati Wonogiri pada Tahun 2008 yang ditindaklanjuti sebanyak 100 %.
 2. Prosentase Peraturan Bupati Wonogiri pada Tahun 2007 yang ditindaklanjuti sebanyak 100 %.
 - g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan:
 1. Tidak ada Perda Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2008 yang dibatalkan.
 - h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah:
 1. Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Perda pada Tahun 2008 sebanyak 12 (dua belas) kali.
 2. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang konsultasi publik.
 3. Adanya media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik yaitu : www.wonogiri.go.id , Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) , Tabloid Gema Wonogiri, Leaflet, Papan pengumuman, buku kehumasan.
 - i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil:

1. Prosentase besaran Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan sebanyak 101,29%
 2. Prosentase belanja publik terhadap DAU sebesar 12,81%
 3. Prosentase belanja publik terhadap DAU sebesar 39,19 %
- j. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah:
1. Prosentasi besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD tahun 2008 sebesar 6,434 %
 2. Prosentase besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman sebesar 0 %
- k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD:
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
 2. Prosentase SILPA terhadap total pendapatan sebesar 19,33 %
 3. Prosentase Proporsi Belanja Langsung sebesar 43, 77 %
 4. Prosentase realisasi pendapatan terhadap anggaranpendapatan sebesar 102,19 %
 5. Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 90,19 %
 6. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 52,9 %
- l. Pengelolaan potensi daerah:
1. Rasio realisasi PAD terhadap Potensi PAD sebesar 124,50 %
 2. Prosentase Peningkatan PAD sebesar 22,59 %
- m. Terobosan/Inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebanyak 6 kali
 2. Keberadaan E-procurement tidak ada.
 3. Jumlah persetujuan investasi sebanyak 49 ijin terdiri dari 6 ijin properti, 37 telekomunikasi / tower dab 6 pertambangan.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pelaksana kebijakan meliputi 8 (delapan) aspek dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 24 (dua puluh empat) penilaian yaitu :

- a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 1. Prosentase jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 46 atau 16,25 % dari total program nasional sebanyak 283.
 2. Adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang digunakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri, yaitu meliputi :
 - Juknis gerakan Penanaman Jambu Mete, Juknis penanaman pisang di pekarangan, Juknis perguliran BPLM.
 - Juknis Program Perluasan dan Pengembangan kesempatan kerja dari Depnakertrans, Juknis Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja dari Depnakertrans RI.
 - Juknis DAK Kependudukan, SPM KB, PTO PNPM Mandiri Perdesaan, Juknis BLM PNPM, Juklak Bantuan Penyehatan Perumahan, Juklak Bantuan Penataan Lingkungan, Juknis Pengelolaan Bantuan UPPKS.
 - Juknis Pelaksanaan Gerhan.
 - Juklak Retribusi Izin Usaha Hotel Melati.
 - Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
 - Kerjasama Operasional (KSO) Bidang Kesehatan dan Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi.
 - Juklak Pelayanan Inseminasi Buatan, Juklak Pelayanan Inseminasi Buatan.
 - Perda tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
 - Perda tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
 - Perda tentang Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemkab. Wonogiri.
 - Perda tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, KK dan Akte Catatan Sipil.

- b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan:
1. Prosentase jumlah Perda yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 100%.
- c. Tingkat capaian SPM :
- Tingkat pencapaian SPM sebagaimana telah disesuaikan dengan IKK diuraikan pada tabel 3 : Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan wajib dan tabel 4 : Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan di atas.
- d. Penataan kelembagaan daerah:
1. Pengisian struktur jabatan dan eselonering SKPD Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2008 belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
 2. Adanya Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional Umum;
 - Jabatan Fungsional Khusus yang terdiri dari : Auditor, Perencana, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Pranata laborat, Sanitarian, Apoteker, Nutrisiones, Fisioterapis, Asisten Apoteker, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Pertanian Lapangan, Guru, Pustakawan, Pengawas, Penilik PLS (Non Formal), Penyuluh KB, Penyuluh Kehutanan Lapangan, Arsiparis, Instruktur, Pengantar Kerja, Pengawas Tenaga Kerja dan Perantara Industri.
- e. Pengelolaan kepegawaian daerah:
1. Prosentase struktur jabatan yang terisi pada SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 100 % kecuali Dinas Pendidikan sebanyak 89,57%, Dinas LHKP sebanyak 90% dan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 94,12%.
 2. Prosentase Pejabat pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 100%, kecuali Dinas Pendidikan sebanyak 53,42%, Dinas Kesejahteraan Sosial sebanyak 27,27%, Dinas Wanperla sebanyak 86,36%, Dinas LHKP sebanyak 70%, Dispendukcapil sebanyak 89,47 dan Dinas Pasar sebanyak 75%.

3. Prosentase Pejabat pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 100%, kecuali BPKD sebanyak 94%, Dinas Pendidikan sebanyak 72,60%, Dinas Wanperla sebanyak 72%, Dinas Tenaga Kerja sebanyak 95%, DKK sebanyak 50,49%, BKD sebanyak 88,24 %, Dispenduk dan Capil sebanyak 95%, Kantor PDE sebanyak 75% dan Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 91%.
 4. Prosentase Pejabat pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 100 %, kecuali untuk Dinkesos sebanyak 90,9% dan BPKD sebanyak 94%.
 5. Prosentase anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai yaitu jumlah alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibandingkan nilai APBD untuk SKPD rata-rata sebesar 3,14%, dengan distribusi pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebesar 10,39%.
- f. Perencanaan pembangunan daerah:
1. Adanya Dokumen Renstra, Renja, RKA pada masing-masing SKPD.
 2. Semua Program RKPD terakomodir dalam RENJA SKPD kecuali Dinas LHKP sebanyak 5,89%, BKD sebanyak 25% dan Kantor PDE sebanyak 45%.
 3. Semua Program RENJA RKPD terakomodir dalam RKA SKPD kecuali Dinas LHKP sebanyak 54,55%, BKD sebanyak 40% dan Kantor PDE sebanyak 45%.
 4. Semua Program RENJA RKPD terakomodir dalam DPA SKPD, Dinas LHKP sebanyak 54,55%, BKD sebanyak 40% dan Kantor PDE sebanyak 45%.
- g. Pengelolaan keuangan daerah:
1. Prosentase alokasi anggaran SKPD terhadap total APBD rata-rata sebesar 3,75%, dengan alokasi anggaran terbesar pada Dinas Pendidikan sebesar 47%.
 2. Prosentase alokasi belanja modal SKPD terhadap total belanja SKPD rata-rata sebesar 14,10%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 66,06%.

3. Prosentase belanja barang dan jasa SKPD terhadap total belanja SKPD rata-rata sebesar 28,24%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 64,88%.
 4. Prosentase total belanja pemeliharaan SKPD terhadap total belanja barang dan jasa SKPD rata-rata sebesar 8,38%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 61,32%.
 5. Prosentase total belanja pemeliharaan SKPD terhadap total belanja SKPD rata-rata sebesar 2,04%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 11,36%.
 6. Adanya laporan keuangan dari masing-masing SKPD Kabupaten Wonogiri yang meliputi Neraca, Calk, Laporan Realisasi Anggaran.
- h. Pengelolaan barang milik daerah:
1. Adanya pengelolaan inventarisasi barang/asset pada tiap-tiap SKPD Kabupaten Wonogiri.
 2. Rasio tanah yang digunakan untuk sarana dan prasarana oleh masing-masing SKPD secara umum telah sesuai dengan pemanfaatannya, hanya sebagian kecil bidang tanah yang belum dimanfaatkan.
 3. Asset yang tidak digunakan oleh SKPD kondisinya rusak berat.
- i. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat.
1. Fasilitas prasarana informasi yang digunakan oleh SKPD berupa Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Website, RSPD, Leaflet, Mobil keliling, Mass media.
 2. SKPD Kabupaten Wonogiri belum ada yang melaksanakan Kegiatan survey kepuasan masyarakat.

D. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diselenggarakan secara sinergis dengan pelaksanaan asas desentralisasi.

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun dari Pihak Ketiga melalui Kementrian/Departemen/ LPND dan dari Pemerintah Propinsi melalui Badan, Kantor,Dinas/Instansi di lingkungan Propinsi Jawa Tengah beberapa departemen yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan, sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan pendidikan diterima dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.262.000.000,- terserap sebesar Rp.2.262.000.000,- atau 100%, melalui Program Pendidikan anak Usia Dini.

b. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan kesehatan diterima dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.481.111.235,- dan terserap sebesar Rp.743.549.599,- atau 29,97%, melalui Program Lingkungan Sehat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan pekerjaan umum yang diterima dari Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana sebesar Rp.10.407.900.000,- dan terserap sebesar Rp.10.336.186.900,- atau 99,31%, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Program Bangunan Pengairan Lainnya

d. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan perencanaan pembangunan diterima dari Departemen Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.6.012.756.000,- terserap sebesar Rp.1.723.832.630,- atau 29,00%, melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Urusan Sosial

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan Sosial yang diterima dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp.1.074.179.330,- dan terserap sebesar Rp. 1.064.223.330,- atau 98,15%, melalui Program Pemberdayaan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS, Program Pemberdayaan Perempuan, Program Pelayanan dan Perlindungan Kesos Anak, Program Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos , Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak cacat, Program Pemberdayaan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS, Program Pelayanan dan Rehabsos, Program Pelayanan dan Rehabsos, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS, Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

f. Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan ketenagakerjaan diterima dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan alokasi dana sebesar Rp.797.857.000,- terserap sebesar Rp.738.062.000,- atau 92,50% dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

g. Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat diterima dari Menteri Dalam negeri, Gubernur Jawa Tengah dan BKKBN Provinsi Jawa

Tengah dengan alokasi dana sebesar Rp.12.399.084.550,- dan terserap sebesar Rp.12.352.568.000,- atau 99,62% dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui antara lain : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengelolaan SDM Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola, Program KB, Program Peningkatan Hak Reproduksi Individu Pelayanan Kesehatan/Per-baikkan Gizi Ibu, Anak dan KB, Program Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin, Program Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, Program Penyelenggaraan Bimbingan Pengayoman dan Linmas, dan lainnya.

h. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan tugas pembantuan urusan pertanian diterima dari Direktorat Jendral Holtikultura, Direktorat Jendral Peternakan, Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan total alokasi dana sebesar Rp.20.269.464.000,- terserap sebesar Rp.19.480.437.759,- atau 96,11% dengan perincian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebesar Rp.19.861.564.000,- terserap sebesar Rp.19.089.485.759,- atau 96,11% dan dilaksanakan Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan sebesar Rp.407.900.000,- terserap sebesar Rp.390.950.000,- atau 95,84%, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Khusus tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dan/Atau Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor : 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Dan/Atau Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II. Pelaksanaan pemungutan PBB sumber dana

berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan pada pos bagi hasil pajak berupa biaya pemungutan sebesar Rp. 994.696.301,- sebagian digunakan untuk pemungutan PBB yang dilakukan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.403.954.026,- sedangkan sisanya digunakan untuk biaya pemungutan di tingkat Desa/Kelurahan.

2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Desa/Kelurahan hanya Pemungutan PBB atas dasar Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 227 Tahun 2007 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri menunjuk para Kepala Dusun/Lingkungan se Kabupaten Wonogiri sebagai petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri dan para Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonogiri sebagai penanggungjawab pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada desa/kelurahan sumber dana operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dari APBD Kabupaten Wonogiri yang berasal dari dana bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah berupa biaya pemungutan.

Pada tahun anggaran 2008 biaya pemungutan PBB yang diberikan kepada Desa/Kelurahan sebesar Rp.590.542.275,-. Adapun pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan PBB dapat dilaporkan bahwa target yang ditetapkan oleh Pemerintah tahun 2008 untuk Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.7.720.923.000,- atau sebanyak 524.069 wajib pajak PBB yang terdiri dari 431.002 wajib pajak pedesaan dan 93.067 wajib pajak perkotaan, terealisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2008 sebesar Rp.10.125.348.460,- atau 131,142%.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan perlu dilaksanakan kerjasama

daerah. Adapun bentuk kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah :

a. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Daerah Lain se Indonesia.

Wujud kerjasama daerah ini terwadahi dalam bentuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 oleh Bupati seluruh Indonesia. Dan pada perkembangannya wadah tersebut dirubah namanya menjadi Badan Kerjasama Seluruh Indonesia (BKCSI) sesuai Keputusan Munas II APKASI tanggal 22 Maret 2005 di Jakarta. Salah satu tujuan kerjasama daerah tersebut adalah meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan secara proaktif kepada Pemerintah terhadap semua kebijakan Pemerintah dan atau pihak lain yang menyangkut kepentingan kabupaten.

b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Daerah disekitarnya, meliputi :

1. Badan Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN

Pengaturannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Bupati/Walikota se SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) Nomor 11D Tahun 2006, Nomor 7847 Tahun 2006, Nomor 36 Tahun 2006, Nomor 26 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006, Nomor 26.a Tahun 2006 dan Nomor 1 Tahun 2006, yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 2006. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan prasarana, pengembangan dan penelitian IPTEK serta bidang lainnya yang disepakati bersama.

2. Badan Kerjasama antar Daerah PAWONSARI,

Pengaturannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Bupati se PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul) Nomor 188.45/334.A/408.21/2008 Tahun 2008, Nomor 17 Tahun 2008 dan Nomor 415.4/KB/05/2008, yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2008. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan meliputi aspek sumber daya, aspek pelayanan masyarakat serta aspek prasarana dan sarana.

3. Badan Kerjasama Antar Daerah KARISMAPAWIROGO

Pada tahun 2008 dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama KARISMAPAWIROGO terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dimana dalam Kesepakatan tersebut disepakati pula untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD Karismapawirogo). Penandatanganan MoU telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, diharapkan pada awal tahun 2009 sudah segera dapat dilaksanakan program-program kegiatan yang dikerjasamakan, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan prasarana, pengembangan dan penelitian IPTEK serta bidang lainnya yang disepakati bersama.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2008 kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang meliputi :

- a. Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai pengamanan penertiban, pemanfaatan dan pengelolaan aset milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kabupaten Wonogiri.
- b. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Cina dalam bentuk kerjasama Sister City diberbagai bidang yang disepakati bersama.
- c. Kerjasama lainnya, dalam rangka fasilitasi kerjasama 3 program pembangunan daerah.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Wonogiri, dilakukan pada tataran koordinasi yang bersifat teknis penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Wonogiri dilakukan dalam berbagai kegiatan yang meliputi antara lain :

- Koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri dalam beberapa pelaksanaan kegiatan antara lain pada kegiatan; Festival Anak Sholeh, Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten, Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pembinaan dan Pengiriman Peserta STQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Monitoring Sarana Ibadah, Sosialisasi Kurikulum TPQ dan Keluarga Sakinah, serta Manasik Haji.
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Statistik Daerah yaitu dilakukan pada kegiatan Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Angka Tahun 2007, Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007, Penyusunan PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2007.
- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum, Pensertifikatan Tanah Pemerintah, Penyusunan Peta Desa-deso Perbatasan, Penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi serta Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan proses perijinan di bidang pertanahan (Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, Ijin Perubahan Status Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Konsolidasi Tanah dll).
- Koordinasi dengan Kepolisian Resort Wonogiri dan Kodim 0728 Wonogiri dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanganan bencana alam, penyelenggaraan SAR, penyelenggaraan urusan perhubungan, serta pelaksanaan TMMD.
- Koordinasi yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Wonogiri adalah pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pos Penyuluhan Hukum Terpadu (POSKUMDU) dan kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
- Selain itu koordinasi dalam tataran pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dilakukan dalam forum “Muspida” yang melibatkan unsur-unsur pimpinan di Kabupaten Wonogiri yaitu Bupati Wonogiri, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Kepala Kepolisian Resort Wonogiri, Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri

dan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. Rapat-rapat koordinasi dalam forum “MUSPIDA” ini dipimpin secara langsung oleh Bupati Wonogiri.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas wilayah masih diarahkan pada penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pada tahun sebelumnya. Batas suatu wilayah secara universal memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun hubungan dengan daerah lain. Ketidakjelasan batas suatu wilayah terkadang akan menimbulkan persoalan dengan daerah lain diantaranya aspek legal, teknis dan sosial ekonomi. Pada Tahun 2008 kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD perubahan adalah Penegasan dan Penetapan Wilayah Administrasi antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Karanganyar yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah (TPPBD) Pemerintah. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri dan dapat diterima dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2008 di Kabupaten Wonogiri terdapat 102 kejadian bencana yang bersifat lokal, yaitu kebakaran 16 kejadian, angin topan 21 kejadian, tanah longsor 50 kejadian dan banjir 15 kejadian yang terjadi di 25 Kecamatan.

Keseluruhan kejadian bencana alam yang tercatat sebanyak 102 kejadian sebagaimana tersebut di atas, secara total menimbulkan kerusakan sebanyak 292 unit rumah, 14 ruas jalan, 34 talud, 18 jembatan dan 1 area hutan, dengan total kerugian akibat yang ditimbulkan mencapai sebesar Rp. 5.142.654.000,-.

Kejadian bencana lain yang juga terjadi setiap tahun dan memerlukan langkah antisipasi dan penanganan yaitu bencana kekeringan yang tersebar di desa-desa di 8 Kecamatan, yaitu :

Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Manyaran dan Kecamatan Giriwoyo.

Selain itu beberapa kejadian memiliki potensi menjadi bencana yang harus diwaspadai yaitu kasus HIV/AIDS, penyebaran virus flu burung (Aviant Influenza/AI) terhadap ternak unggas dan manusia serta kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dapat berdampak bagi manusia, dimana untuk tahun 2008 dengan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan dan antisipasi melalui instansi yang terkait kejadian tersebut, dapat diminimalisir dan tidak ada kejadian yang menonjol.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada tahap pasca bencana sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan keuangan dari dana APBD Kabupaten Wonogiri didistribusikan ke 19 Kecamatan meliputi 30 Desa/Kel yang diberikan kepada 130 warga dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 45.350.000,-.
2. Pemberian bantuan beras Gubernur Jawa Tengah dari dana APBD Provinsi untuk korban bencana alam di Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 sebanyak 100 Ton.
3. Pemberian bantuan keuangan dari Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk Korban Bencana alam akibat Banjir, Tanah Longsor kejadian tanggal 26 Desember 2007 kepada korban yang rumahnya rusak berat, roboh dan hanyut sebanyak 555 Kepala Keluarga (KK) dari 18 Kecamatan yang terdiri dari 77 Desa/Kelurahan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dengan jumlah total Rp. 5.550.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Pelaksanaan Kegiatan penanganan bencana dengan anggaran yang dikelola Satlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut dicairkan melalui DPU, Dinas Sosial, Bagian Kesra Setda dan Kantor Kesbang dan Linmas, dengan realisasi dana sebesar Rp.438.758.000,-.
5. Perbaikan sarana dan prasarana umum yang mengalami kerusakan akibat bencana alam di mana pelaksanaan di tahun 2008 ini sekaligus menangani kerusakan akibat bencana di tahun 2007 melalui

pembebanan belanja tidak terduga sebesar Rp.3.244.235.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.218.237.200,- atau 99,20%.

6. Pemberian bantuan pembelian air bersih ke desa-desa di kecamatan yang terkena dampak kekeringan berupa uang dengan nilai Rp. 110.000,- per tangki.
7. Rehabilitasi infrastruktur talud, jalan dan jembatan 28 paket kegiatan di 15 Kecamatan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan 17 paket kegiatan di 13 Kecamatan dari dana bantuan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Wonogiri merencanakan dan mulai tahun 2008 telah di lakukan pembangunan infrastruktur guna pengembangan Kawasan karst di Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro dan sekitarnya.

Pada tahun anggaran 2007 telah dilakukan pengadaan lahan seluas 36.167 m² rencana lokasi pembangunan gedung museum karst dunia di desa Gebangharjo yang dilanjutkan pada tahun 2008 untuk fasilitas infrastruktur penunjang seluas 258.658 m² dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.797.617.220,- atau 63%, sehingga total luas lahan untuk rencana kawasan karts yang telah dibebaskan seluas 294.825 m².

7. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Stabilitas Wilayah Kabupaten Wonogiri sepanjang Tahun 2007 secara umum tergolong mantap, hal itu ditunjukkan dengan tidak terjadinya permasalahan yang menonjol dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban, mengganggu stabilitas pembangunan daerah, konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme dan lain sebagainya. Adanya unjuk rasa/ penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat, aksi-aksi demonstrasi/ penyampaian tuntutan hak dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat maupun pemenuhan hak-hak masyarakat umum.

Permasalahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bukan hanya masalah Pemerintah Daerah tetapi juga

masalah regional maupun nasional, sehingga penanganannya melibatkan unsur aparat keamanan. Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan membentuk Tim Terpadu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari jajaran Kodim 0728, Polres, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Wonogiri Kepada Masyarakat Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 sebagai implementasi azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Informasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2008 ini semoga dapat dijadikan sumber informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kami menyadari bahwa disamping keberhasilan dalam pencapaian kinerja masih terdapat kekurangan dan belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak, terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2008 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan saran pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui : *Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Jl. Kabupaten No. 6 Telp. (0273) 321001,323433 Psw. 2051 Fax. (0273) 322318; Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Jl. Kabupaten No. 6 Telp. (0273) 321002,323433 Psw.2062 ; WWW.Wonogiri@go.id.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, Amin.

Wonogiri, Mei 2008

BUPATI WONOGIRI

BEGUG POERNOMOSIDI